

**LAKIP
2022**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEM-
BERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

KABUPATEN FLORES TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber dan kebijaksanaan. Selain itu, penyusunan LAKIP ini berdasarkan evaluasi dan analisa capaian kinerja kegiatan dengan sasaran dan mengacu pada Rencana Strategis 2017 – 2022 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dari penyusunan LAKIP ini adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, serta dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program.

Walaupun telah diupayakan seoptimal mungkin melalui pendekatan koordinasi, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi oleh masing-masing bidang terkait.

LAKIP ini dapat menjadi panduan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur untuk meningkatkan kinerja organisasi sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bahan masukan dan partisipasi aktif dalam penyusunan laporan ini.

Larantuka, Januari 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak



Sri Ardi Rahaju, S.Sos, MAP
NIP 19691016 199903 2 007

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	
SISTEMATIKA PELAPORAN	6
IKHTISAR EKSEKUTIF	7
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1. Latar Belakang	10
1.2 Profil dan Sejarah Singkat	10
1.3 Kedudukan dan Susunan Organisasi	11
1.4 Dasar Hukum	22
1.5 Permasalahan dan Kelemahan	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 Pernyataan Visi	22
2.2 Perencanaan Kinerja	22
1.3 Indikator Kinerja Utama	25
1.4 Rencana Kerja Tahunan	26
1.5 Penetapan Kinerja Tahun 2021	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 Capaian Kinerja	30
3.1.1 Pencapaian Sasaran Strategis	30
3.2 Realisasi Anggaran	32
3.2.1 Target dan Realisasi Belanja	32
3.2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan	33
BAB IV PENUTUP	38
4.1 Kinerja Perangkat Daerah	38
4.2 Rekomendasi tindak Lanjut	38

DAFTAR TABEL/GAMBAR

	Hal.
Tabel 1.....	8
Tabel 2.1.....	24
Tabel 2.2.....	26
Tabel 2.3.....	27
Tabel 2.4.....	28
Tabel 2.5.....	28
Tabel 3.1.....	31
Tabel 3.2.....	31
Tabel 3.3.....	32
Tabel 3.4.....	33
Tabel 3.5.....	33
Tabel 3.6.....	36
Gambar 1.1.....	20
Gambar 1.2.....	20
Gambar 1.3.....	21
Gambar 1.4.....	21

SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 menjelaskan pencapaian kinerja selama tahun 2022 dengan berbagai keberhasilan maupun hambatannya. Sistematika penyajian laporan kinerja adalah sebagai berikut :

Pendahuluan

Berisi penjelasan secara ringkas mengenai latar belakang, aspek strategis serta permasalahan yang dihadapi.

Perencanaan Kinerja

Berisi penjelasan rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2017-2022; visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, perjanjian kinerja, monitoring dan evaluasi pencapaian rencana strategis tahun 2022.

Akuntabilitas Kinerja

Berisi penjelasan pencapaian kinerja tahun 2021 beserta realisasi anggaran, perbandingan pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya serta dengan akhir tahun Renstra.

Penutup

Berisi kesimpulan atas Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022.

Lampiran

Berisi data dukung atas penjelasan dalam laporan ini.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada pasal 56 Ayat (1) BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) memiliki tugas melaksanakan Pengendalian Penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana. Kemudian untuk melaksanakan tugas tersebut, pada pasal 56 Ayat (2) BKKBN mempunyai fungsi antara lain : a). perumusan kebijakan nasional; b). penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK); c). pelaksanaan advokasi dan koordinasi; d). penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi; e). penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; f). pembinaan, pembimbingan dan fasilitas di Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana.

Laporan kinerja tahun 2022 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 juga merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2017-2022.

Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah, maka seluruh unit kerja diarahkan untuk turut serta menyukseskan visi dan misi pembangunan 2017-2022, di mana visi pemerintah untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah untuk mewujudkan “Flores Timur Sejahtera Dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata, dengan misi yaitu: (1) Selamatkan Orang Muda Flores Timur, (2) Selamatkan Infrastruktur, (3) Selamatkan Taman Rakyat, (4) Selamatkan Laut Flores Timur, (5) dan Reformasi Birokrasi.

Dalam tahun ketiga pelaksanaan RPJMD, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur berupaya meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai visi dan misi serta tujuan strategis. Untuk memastikan tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat tercapai, maka telah ditetapkan sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sesuai visi BKKBN Tahun 2020 yaitu “Mewujudkan

Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”, maupun untuk mewujudkan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, persebaran penduduk dan lingkungan hidup, serta meningkatkan kualitas keluarga bdi Indonesia dalam mendukung program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah merumuskan sasaran program dan menetapkan indikator sasaran program sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan strategis. Sasaran program beserta indikatornya ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja selama tahun 2022. Laporan Kinerja juga dimanfaatkan sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

Hasil penilaian kinerja tahun 2021 menunjukkan bahwa dari Lima (5) indikator kinerja tidak seluruhnya tercapai. Ikhtisar capaian tersebut tampak sebagai berikut:

Tabel: 1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

NO	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi (%)
1	Cakupan PUS Peserta KB Aktif	68 %	38,20 %
2	Cakupan Pelayanan KB Keluarga Miskin	89%	76 %
3	Partisipasi Perempuan pada Jabatan Publik	42,50%	55%
4	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	65%	62,8 %
5	Menurunnya Kasus Kekerasan Terhadap Anak	20 %	20 %

Uraian capaian program tersebut adalah :

1. Cakupan PUS Peserta KB Aktif, Pencapaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk IKU 1 adalah sebesar 38,20 % dari target 68% ini diakibatkan rendahnya capaian peserta KB untuk tahun 2022
2. Cakupan Pelayanan KB Keluarga Miskin. Pencapaian untuk IKU 2 adalah 76% dari target 89%
3. Partisipasi Perempuan Pada Jabatan Publik. Pencapaian untuk IKU 3 adalah 55 % dari target 42,50%
4. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan. Pencapaian untuk IKU ke 4 adalah 62,8 % dari target 65 %
5. Menurunnya Kasus Kekerasan terhadap Anak yang ditangani untuk IKU 5 adalah sebesar 20% dari target 20 %.

Dari 5 indikator kinerja utama, yang targetnya terpenuhi ada satu indikator, sedangkan yang lainnya belum terpenuhi sesuai target. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target indikator kinerja tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Amanat penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Profil dan Sejarah Singkat

Pembangunan Kependudukan dan KB merupakan salah satu program sosial dasar yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk dan sekaligus berkontribusi terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk. Program ini merupakan investasi jangka panjang yang keberhasilannya akan menjadi pondasi bagi tumbuhnya keluarga yang berkualitas yang pada akhirnya memberi peluang bagi terciptanya sumber daya manusia dan generasi masa depan yang tangguh dan mandiri.

Program KB di Kabupaten Flores Timur pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015 dan pada saat itu nomenklatur BKKBN adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Namun di tahun 2009 diterbitkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, sehingga berimplikasi terhadap perubahan kelembagaan, visi dan misi BKKBN. Undang-undang tersebut mengamanatkan perubahan kelembagaan BKKBN yang semula Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Jika dilihat situasi dan kondisi masalah kependudukan di Kabupaten Flores Timur memerlukan perhatian dan penanganan yang seksama, lebih sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memperkuat program KKBPK hingga ke pelosok-pelosok daerah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

1.3 Kedudukan dan Susunan Organisasi

Kedudukan dan Susunan Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor: 78 Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Fungsional Perencana.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk:
 1. Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
- d. Bidang Keluarga Berencana:
 1. Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan:
 1. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
- f. Bidang Perlindungan Anak:
 1. Fungsional Analisis Kebijakan

Tugas dan Fungsi

Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan administrasi dinas;
 - d. pembinaan, pengoordinasian dan pengendalian urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat:

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (1) Sekretariat, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan, mengarahkan dan mengoordinasikan urusan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. penyusunan program dan anggaran;
 - c. pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara/daerah; dan
 - d. pengelolaan urusan kepegawaian.

Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pengendalian Penduduk. Bidang pengendalian penduduk menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja pengendalian penduduk;
- b. perumusan kebijakan teknis pengendalian penduduk;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian penduduk;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengendalian penduduk; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana dalam mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Keluarga Berencana. Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja keluarga berencana;
- b. perumusan kebijakan teknis keluarga berencana;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan keluarga berencana;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan keluarga berencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan. Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja pemberdayaan perempuan;
- b. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan perempuan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Anak

Bidang Perlindungan Anak dalam mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak. Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja perlindungan anak;
- b. perumusan kebijakan teknis perlindungan anak;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan anak;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan perlindungan anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara/daerah.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam menyelenggarakan fungsi:

- a penatausahaan administrasi perkantoran;
- b pengelolaan dokumen kepegawaian;
- c pengelolaan perlengkapan perkantoran;
- d pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah; dan
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan Dinas. Sub Bagian Keuangan dalam, menyelenggarakan fungsi:

- a perencanaan pengelolaan keuangan;
- b pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c penatausahaan keuangan;
- d verifikasi dan pembukuan laporan keuangan; dan
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Perencana

Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan pelaksanaan Program, Data dan Evaluasi kegiatan di lingkungan Dinas. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi, menyelenggarakan fungsi:

- a penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi;

- b perencanaan program, data dan evaluasi;
- c pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi; dan
- d pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Dan Fungsi Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Bidang Pengendalian Penduduk

Membantu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dalam menyelenggarakan urusan advokasi dan kerjasama, dan melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja advokasi dan kerjasama;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis advokasi dan kerjasama;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan advokasi dan kerjasama;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan advokasi dan kerjasama; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
- e. penyusunan rencana kerja data dan informasi;
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis data dan informasi;
- g. pelaksanaan program dan kegiatan data dan informasi;
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan data dan informasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- j. penyusunan rencana kerja pengendalian pergerakan penduduk;
- k. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian pergerakan penduduk;
- l. pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian pergerakan penduduk;
- m. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengendalian pergerakan penduduk; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Dan Fungsi Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Bidang Keluarga Berencana

Membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana dalam menyelenggarakan urusan Bidang Keluaraga Berencana sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi;

- c. pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- f. penyusunan rencana kerja jaminan pelayanan keluarga berencana;
- g. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis jaminan pelayanan keluarga berencana;
- h. pelaksanaan program dan kegiatan jaminan pelayanan keluarga berencana;
- i. pengendalian, evaluasi dan pelaporan jaminan pelayanan keluarga berencana; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- k. penyusunan rencana kerja pembinaan dan peningkatan kesetaraan keluarga berencana;
- l. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan kesetaraan keluarga berencana;
- m. pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesetaraan keluarga berencana;
- n. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan peningkatan kesetaraan keluarga berencana; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Dan Fungsi Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Pada Bidang Pemberdayaan Perempuan

Membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam menyelenggarakan urusan bina ekonomi perempuan kepala keluarga dan tugas sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja bina ekonomi perempuan kepala keluarga;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bina bina ekonomi perempuan kepala keluarga;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan bina ekonomi perempuan kepala keluarga;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan bina ekonomi perempuan kepala keluarga; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- f. Penyusunan rencana kerja bina sosial, politik dan hukum;
- g. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bina sosial, politik dan hukum;
- h. pelaksanaan program dan kegiatan bina sosial, politik dan hukum;
- i. pengendalian, evaluasi dan pelaporan bina sosial, politik dan hukum; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- k. penyusunan rencana kerja bina kualitas keluarga;
- l. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bina kualitas keluarga;
- m. pelaksanaan program dan kegiatan bina kualitas keluarga;
- n. pengendalian, evaluasi dan pelaporan bina kualitas keluarga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Dan Fungsi Fungsional Analisis Kebijakan pada Bidang Perlindungan Anak

Membantu Kepala Bidang Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan urusan pada bidang perlindungan anak sebagai berikut:

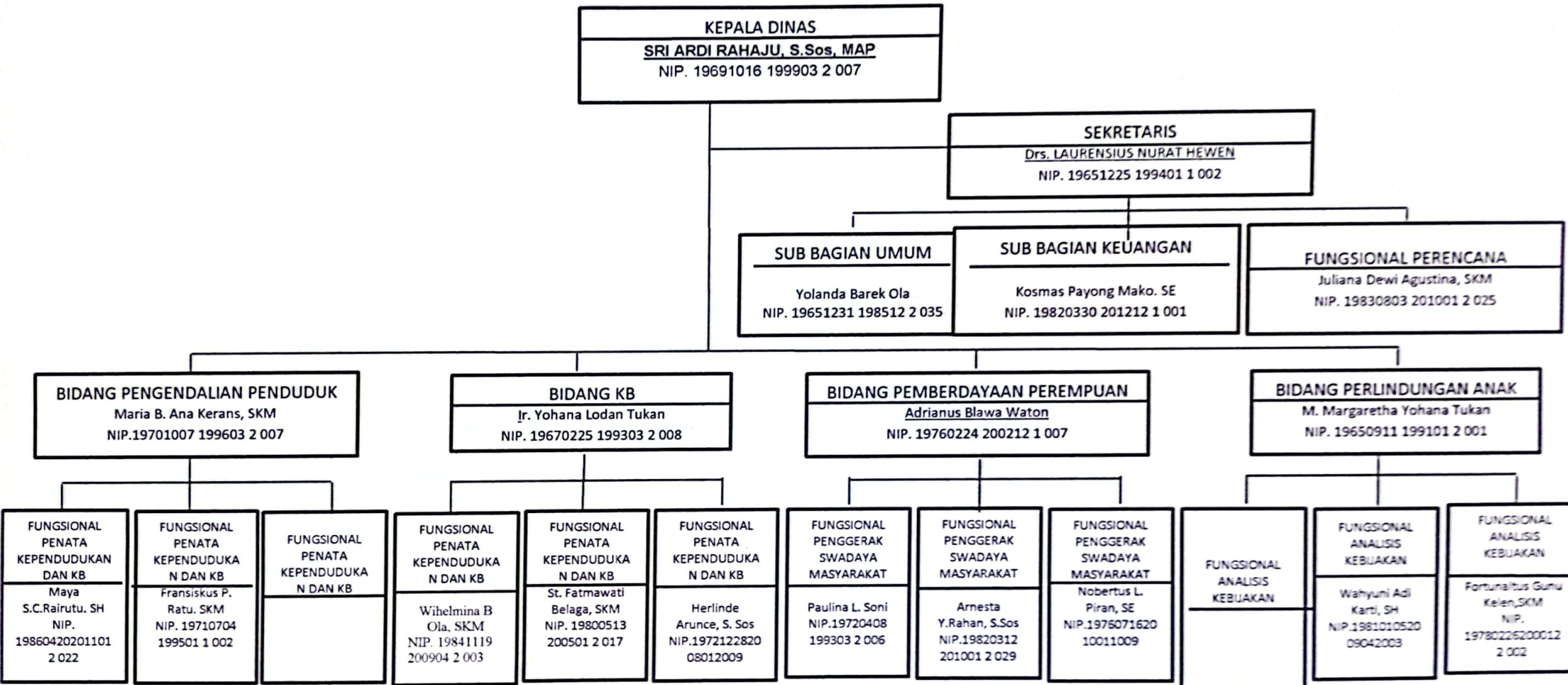
- a. penyusunan rencana kerja pengasuhan alternatif dan pendidikan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengasuhan alternatif dan pendidikan;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan pengasuhan alternatif dan pendidikan;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengasuhan alternatif dan pendidikan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- f. penyusunan rencana kerja hak sipil, informasi dan partisipasi;
- g. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis hak sipil, informasi dan partisipasi;
- h. pelaksanaan program dan kegiatan hak sipil, informasi dan partisipasi;
- i. pengendalian, evaluasi dan pelaporan hak sipil, informasi dan partisipasi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- k. penyusunan rencana kerja kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- l. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- m. pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- n. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur memiliki struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut:

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN FLORES TIMUR**

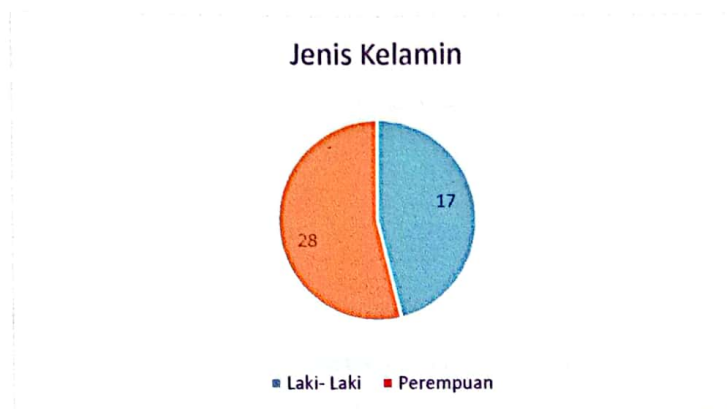


Sumber Daya

Hingga akhir tahun 2022, jumlah sumber daya manusia yang aktif di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 152 orang (termasuk PNS dan Non PNS PKB/PLKB). Bila dirinci, ASN yang penempatan di Dinas sebanyak 27 orang, PPPK sebanyak 17 orang dan PKB/PLKB PNS sebanyak 18 orang dilapangan. Non ASN di Dinas sebanyak 90 orang dengan rincian 14 orang di Dinas dan dilapangan sebanyak 76 orang.

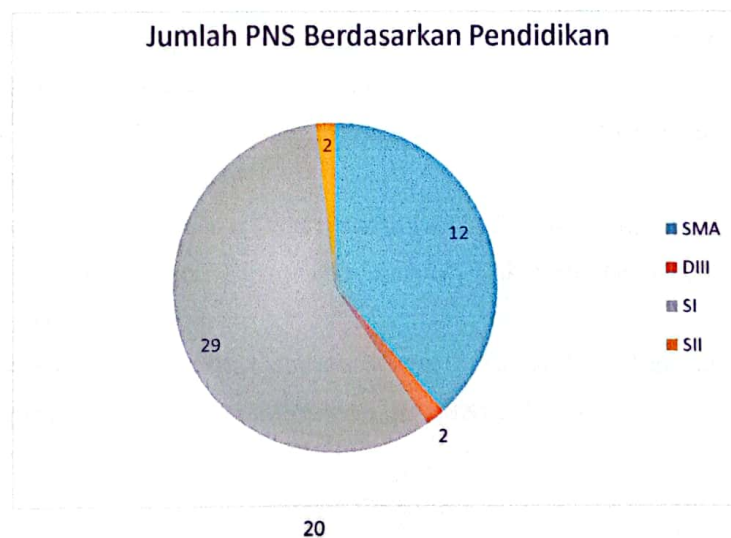
Gambar 1.1

Jumlah ASN Di Dinas dan Dilapangan berdasarkan Jenis Kelamin

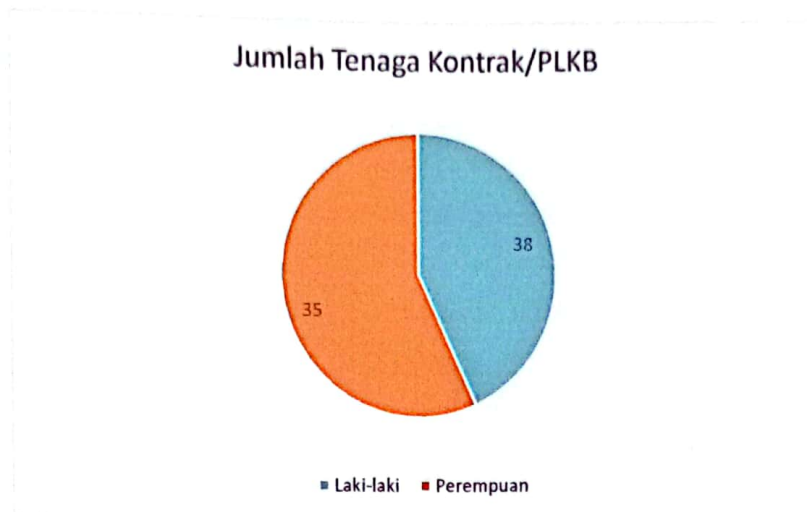


Gambar 1.2

Jumlah ASN Di Dinas dan Lapangan Berdasarkan Pendidikan



Gambar 1.3
Jumlah Tenaga Kontrak Di Dinas dan Lapangan Berdasarkan Jenis Kelamin



1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 adalah:

1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
5. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;

1.5 Permasalahan dan Kelemahan

1. Belum memiliki Grand Design Kependudukan
2. Belum optimalnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB secara merata kepada masyarakat terutama di wilayah DTPK dan miskin perkotaan.
3. Rasio tenaga PKB dan PLKB dibanding dengan wilayah binaan.
4. Pengetahuan dan keterampilan pengelola dan pelaksana program KKBPK di tingkat Kabupaten/Kota masih rendah, karena sering terjadi mutasi.
4. Kuantitas maupun kualitas pencatatan dan pelaporan dari tingkat lapangan sering terlambat dan belum akurat.

Dukungan anggaran program KKBPK, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Pemerintah Daerah masih minim.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi Pembangunan Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur mendukung visi daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005- 2025 yakni “ **Flores Timur Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing**”, dengan misi pembangunan daerah yakni:

1. Mewujudkan daya saing
2. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
3. Mewujudkan manusia dan masyarakat bermoral dan berbudaya
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik

2.2 Perencanaan Kinerja

Dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017- 2022, ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator jangka menengah serta target kinerjanya disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Dinas P2KBP3A
Kabupaten Flores Timur (2017-2022)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran (Tahun)					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
Terselamatkan nya orang muda dari masalah sosial budaya	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Cakupan PUS Peserta KB Aktif	%	65	65	68	68	68	68
		Cakupan Akseptor Baru	%	70	70	70	70	70	70
		Jumlah PIK Remaja Yang Aktif	PIK	11	5	5	5	5	5
		Jumlah Tenaga Pendamping Bina Keluarga yang dibina	Orang	80	80	80	80	80	80
	Meningkatnya peran perempn	Presentase Kasus Kekerasan	%	20	20	20	20	20	20

uan anak serta perlindu ngan terhada p peremp uan dan anak	Terhadap Perempu an dan Anak yang ditangani							
	Jumlah Lembaga Perempu an dan anak yang terbina	Le mb aga	8	19	20	19	19	19
	Jumlah Lembaga Perempu an dan Anak Yang difasilitasi	Le mb aga	0	8	28	47	56	85
	Jumlah Perempu an yang diinterven si	Ora ng	0	75	150	125	125	125
	Partisipasi Angkatan Kerja Perempu an	%	65	65	65	65	65	65

2.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan mempedomani Indikator Kinerja Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017- 2022, serta rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017- 2022.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksud ditetapkan dengan memilih indicator- indicator kinerja yang berfokus pada tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur. Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Penjelasan Indikator Kinerja Utama DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penjelasan Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		
		Cakupan Peserta KB Aktif	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$
		Cakupan Pelayanan KB Keluarga Miskin	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan KB Keluarga Pra Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sejahtera}}{\text{Seluruh Tahapan Keluarga Sejahtera}} \times 100\%$
2	Meningkatkan Peran Perempuan, Anak serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Partisipasi Perempuan pada jabatan Publik	$\frac{\text{Jumlah Pekerja Perempuan Pada Jabatan Publik}}{\text{Jumlah Pekerja Pada Jabatan Publik}} \times 100\%$
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja Perempuan Yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja Perempuan}} \times 100\%$
		Menurunnya kasus Kekerasan terhadap Anak	

2.4 Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri atas sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis dan target kinerja sasaran sebagaimana termuat di dalam dokumen Rencana Strategis Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2017- 2022 dan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur 2022.

Tabel 2.4

Tabel Kinerja Tahunan (RKT) Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Cakupan Peserta KB Aktif	68 %
	Cakupan Akseptor Baru	70 %
Meningkatnya Peran Perempuan, Anak Serta Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak	Jumlah Lembaga Perempuan dan Anak yang Terbina	19 Lembaga
	Jumlah Lembaga Perempuan dan Anak yang difasilitasi	56 Lembaga
	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani	20 %

2.5 Penetapan Kinerja Tahun 2022

Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riview Atas Laporan Kinerja, menyatakan bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan demikian, maka perjanjian kinerja adalah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta berdasarkan sumberdaya yang tersedia. Dalam hal ini Bupati Flores Timur sebaga pemberi amanah kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur sebagai penerima amanah.

Tabel 2.5

Penetapan Kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Cakupan Peserta KB Aktif	68%
	Cakupan Akseptor Baru	70%
Meningkatnya Peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang terbina	19 Lembaga
	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang difasilitasi	56 Lembaga
	Presentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak yang ditangani	20%

Sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja tersebut direncanakan dapat dicapai melalui program pembangunan dan anggaran prioritas sebagai berikut:

Tabel 2.5.1
Program dan Anggaran Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur Tahun 2022

Uraian Kegiatan	Lokasi	Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Setelah Realisasi	%	Targ et Kine rja	Real isasi Kine rja
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		15.844.120.009	11.875.298.526	10.437.661.649	1.437.636.877	87,89		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota		15.236.120.009	3.726.526.861	3.455.039.884	271.486.977	92,71		
Koordinasi dan Penyusunan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja	Larant uka	30.000.000	67.199.000	49.550.000	17.649.000	73,74	5 Dok	7 Dok
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Larant uka	2.129.000.000	2.395.361.336	2.208.574.186	186.787.150	92,20	14 Bln	12 Bln
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Larant uka	43.520.000	49.800.000	45.000.000	4.800.000	90,36	12 Bln	12 Bln
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Larant uka	32.500.000	42.566.000	39.842.994	2.723.006	93,60	52 Jeni s	52 Jeni s
Penyediaan Barang Cetak Penggandaan	Larant uka	16.000.000	15.000.000	15.000.000	0	100,00	4000 Lbr	4000 Lbr
Fasilitas Kunjungan Tamu	Larant uka	15.000.000	40.000.000	21.500.000	18.500.000	53,75	500	358
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Larant uka	52.000.000	85.855.000	74.097.989	11.757.011	86,31	24	23
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Larant uka	1.100.000	1.000.000	1.000.000	0	100,00	12 bln	12 bln
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Larant uka	58.000.000	30.950.000	29.713.910	1.236.090	96,01	12 bln	12 Bln
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larant uka	12.834.000.009	892.800.000	892.800.000	0	100,00	12 Bln	12 Bln
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Larant uka	15.000.000	99.995.525	72.670.805	27.324.720	72,67	5 Unit	3 Unit
Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lara ntuk a	5.000.000	3.000.000	2.940.000	60.000	98,00	1 Uni t	1 Uni t

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Larantuka	5.000.000	3.000.000	2.350.000	650.000	78,33	3 Unit	3 Unit
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		403.800.000	160.000.000	157.830.000	2.170.000	98,64		
Program Pengarusutaman Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan kab/Kota		250.000.000	85.000.000	82.925.000	2.075.000	97,56		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	19 Kecamatan Berpusat Larantuka	35.000.000	35.000.000	34.925.000	75.000	99,79	16 Lembaga	16 Lembaga
Sosialisasi Kebijakan PUG termasuk PPRG	19 Kecamatan Berpusat Larantuka	37.000.000	20.000.000	19.000.000	1.000.000	95,00	150 Org	150 Org
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Larantuka	178.000.000	30.000.000	29.000.000	1.000.000	96,67	48 Kelompok	48 Kelompok
Program Perlindungan Perempuan		82.000.000	30.000.000	29.905.000	95.000	99,68		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	19 Kecamatan	82.000.000	30.000.000	29.905.000	95.000	99,68	1 Kali	1 Kali
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		41.500.000	20.000.000	20.000.000	0	100,00		
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota	Berpusat Di Larantuka	41.500.000	20.000.000	20.000.000	0	100,00	1 Kali	1 Kali
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		30.300.000	25.000.000	25.000.000	0	100,00		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Larantuka, Ite Mandiri, Demon	30.300.000	25.000.000	25.000.000	0	100,00	19 Kecamatan	19 Kecamatan

	Pagang dan Lewolema							
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

BIDANG KELUARGA BERENCANA		204.200.000	7.988.771.665	6.824.791.765	1.163.979.900	85,43		
Program Pembinaan Keluarga Berencana		95.000.000	7.879.571.665	6.720.991.765	1.158.579.900	85,30		
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Larantuka,	42.500.000	30.000.000	28.450.000	1.550.000	94,83	76 Org	76 Org
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	19 Kecamatan	7.882.042.500	7.813.932.500	6.657.152.600	1.137.779.900	85,20	19 Kec	19 Kec
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Larantuka	20.000.000	3.139.165	2.889.165	250.000	92,04	1 Paket	1 Paket
Dukungan Operasional Pelayanan KB Gerak	63 Klinik	32.500.000	32.500.000	32.500.000	0	100,00	63 Klinik	63 Klinik
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		109.200.000	109.200.000	103.800.000	5.400.000	95,05		
Penyediaan Biaya operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	19 Kec	109.200.000	109.200.000	103.800.000	5.400.000	95,05	61 org	57 org

Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga
/UPPKS

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur diukur berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerjanya. Pengukuran capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target rencana kinerja dengan realisasinya. Pencapaian sasaran strategis sesuai indikator dan target kinerja pada tahun 2022, yang disajikan secara berurutan mulai dari penetapan target, realisasi, capaian kinerja tahunan serta perbandingan capaian kumulatif sampai tahun 2022 terhadap target maupun capaian Renstra DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur.

3.1.1 Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Meningkatnya Peran Perempuan Anak, serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Sasaran Strategis pertama di dalam perjanjian Kinerja DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, adapun pencapaian sasaran strategis ini mengacu pada indikator Persentase Peserta KB Aktif dan Persentase Akseptor Baru. Dalam Renstra DP2KBP3A tahun 2017- 2022 target yang ditetapkan untuk sasaran strategis ini pada tahun 2022 adalah sebesar 68 % untuk Cakupan Peserta KB Aktif dan 70 % untuk Cakupan Akseptor Baru, dan sasaran strategis meningkatnya peran perempuan anak, serta perlindungan terhadap perempuan mengacu pada indikator jumlah lembaga perempuan dan anak yang terbina pada tahun 2022 sebesar 19 lembaga, jumlah lembaga perempuan dan anak yang difasilitasi sebesar 56 lembaga, persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sebesar 20%, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Sasaran Strategis Dinas P2KBP3A

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Cakupan Peserta KB Aktif	65%	65%	68%	68%	68%
	Cakupan Akseptor Baru	70%	70%	70%	70%	70%

Meningkatnya Peran Perempuan Anak, serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang terbina	8	19	20	19	19
	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang difasilitasi	0	8	28	47	56
	Presentase Kasus Kekerasan Terhadap anak yang ditangani	20	20	20	20	20

Hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Pencapaian Sasaran Strategis Dinas P2KBP3A Tahun 2022

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
			2022	2022
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Cakupan Peserta KB Aktif	%	68	38,20
	Cakupan Akseptor Baru	%	70	39,95
Meningkatnya Peran Perempuan Anak, serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang terbina	Lembaga	19	0
	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang difasilitasi	Lembaga	47	0
	Presentase Kasus Kekerasan Terhadap anak yang ditangani	%	20	20

Dari tabel diatas dapat dilihat target dan realisasi kinerja sasaran untuk tahun 2022 bahwa pada sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pada cakupan peserta KB aktif masih belum mencapai target yang ditetapkan.

Sementara pada sasaran strategis meningkatnya peran Perempuan anak, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak bahwa jumlah lembaga perempuan dan anak yang dibina, jumlah lembaga perempuan dan anak yang difasilitasi dan persentase kasus

kekerasan terhadap anak yang ditangani masih rendah, hal ini disebabkan oleh masih minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut.

Sebagai perbandingan capaian kinerja pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel : 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Target	Realisasi
				2022	2022
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Cakupan Peserta KB Aktif	%	55%	68%	38,20
	Cakupan Akseptor Baru	%	54%	70%	39,95
Meningkatnya Peran Perempuan Anak, serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang terbina	Lembaga	0	19	0
	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang difasilitasi	Lembaga	17	56	0
	Presentase Kasus Kekerasan Terhadap anak yang ditangani	%	20	20	20

1.7 Realisasi Anggaran

1.7.1 Target dan Realisasi Belanja

Anggaran yang dialokasikan untuk Program/ Kegiatan Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 seluruhnya sebelum perubahan sebesar Rp. 15.844.120.009,- dan setelah mengalami perubahan sebesar Rp. 11.875.298.526,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.437.661.649 atau sebesar 87,89 %. Anggaran tersebut terdiri dari belanja operasional dan belanja modal.

3.2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan

Pada tahun 2022 Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur melaksanakan 7 Program 14 Kegiatan dan 29 Kegiatan dalam mewujudkan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur. Adapun hasil pengukuran terhadap kinerja keuangan dari program dan kegiatan strategis tersebut dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan
untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Strategi Dinas P2KBP3A
Kabupaten Flores Timur

Uraian Kegiatan	Lokasi	Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Setelah Realisasi	%	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		403.800.000	160.000.000	157.830.000	2.170.000	98,64		
Program Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan kab/Kota		250.000.000	85.000.000	82.925.000	2.075.000	97,56		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	19 Kec Berpu sat Larant uka	35.000.000	35.000.000	34.925.000	75.000	99,79	16 Lembaga	16 Lembaga
Sosialisasi Kebijakan PUG termasuk PPRG	19 Kec Berpu sat Larant uka	37.000.000	20.000.000	19.000.000	1.000.000	95,00	150 Org	150 Org
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Larant uka	178.000.000	30.000.000	29.000.000	1.000.000	96,67	48 Kelompok	48 Kelompok
Program Perlindungan Perempuan		82.000.000	30.000.000	29.905.000	95.000	99,68		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	19 Kecamatan	82.000.000	30.000.000	29.905.000	95.000	99,68	1 Kali	1 Kali
Program Pengelolaan Sisten Data Gender dan Anak		41.500.000	20.000.000	20.000.000	0	100,00		
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota	Berpu sat Di Larant uka	41.500.000	20.000.000	20.000.000	0	100,00	1 Kali	1 Kali

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		30.300.000	25.000.000	25.000.000	0	100,00		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Larantuka, Ile Mandiri, Demon Pagon g dan Lewol ema	30.300.000	25.000.000	25.000.000	0	100,00	19 Kec	19 Kec
BIDANG KELUARGA BERENCANA		8.066.242.500	7.988.771.665	6.824.791.765	1.163.979.900	85,43		
Program Pembinaan Keluarga Berencana		7.957.042.500	7.879.571.665	6.720.991.765	1.158.579.900	85,30		
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Larantuka,	42.500.000	30.000.000	28.450.000	1.550.000	94,83	76 Org	76 Org
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	19 Kecamatan	7.882.042.500	7.813.932.500	6.657.152.600	1.137.779.900	85,20	19 Kec	19 Kec
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Larantuka	20.000.000	3.139.165	2.889.165	250.000	92,04	1 Paket	1 Paket
Dukungan Operasional Pelayanan KB Gerak	63 Klinik	32.500.000	32.500.000	32.500.000	0	100,00	63 Klinik	63 Klinik
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		109.200.000	109.200.000	103.800.000	5.400.000	95,05		

Penyediaan Biaya operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS	19 Kec	109.200.000	109.200.000	103.800.000	5.400.000	95,05	61 org	57 org
TOTAL		8.470.042.500	8.148.771.665	6.982.621.765	1.166.149.900			

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 telah dialokasikan belanja sebesar Rp. 8.470.042.500 dan setelah perubahan menjadi Rp. 8.148.771.665 yang digunakan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur, dengan realisasi sebesar Rp. 6.982.621.765 atau sebesar 86 %

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan utama Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur, maka Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur juga melaksanakan program/ kegiatan rutin yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel: 3.6
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Rutin Dinas P2KBP3A
Kabupaten Flores Timur Tahun 2021

Uraian Kegiatan	Lokasi	Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Setelah Realisasi	%	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota		15.236.120.009	3.726.526.861	3.455.039.884	271.486.977	92,71		
Koordinasi dan Penyusunan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja	Larantuka	30.000.000	67.199.000	49.550.000	17.649.000	73,74	5 Dok	7 Dok
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Larantuka	2.129.000.000	2.395.361.336	2.208.574.186	186.787.150	92,20	14 Bln	12 Bln

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laran tuka	43.520.000	49.800.000	45.000.000	4.800.000	90,36	12 Bln	12 Bln
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Laran tuka	32.500.000	42.566.000	39.842.994	2.723.006	93,60	52 Jenis	52 Jenis
Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan	Laran tuka	16.000.000	15.000.000	15.000.000	0	100,00	4000 Lbr	4000 Lbr
Fasilitas Kunjungan Tamu	Laran tuka	15.000.000	40.000.000	21.500.000	18.500.000	53,75	500	358
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laran tuka	52.000.000	85.855.000	74.097.989	11.757.011	86,31	24	23
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laran tuka	1.100.000	1.000.000	1.000.000	0	100,	12 bln	12 bln
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Laran tuka	58.000.000	30.950.000	29.713.910	1.236.090	96,01	12 bln	12 Bln
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laran tuka	12.834.000.009	892.800.000	892.800.000	0	100,	12 Bln	12 Bln
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Laran tuka	15.000.000	99.995.525	72.670.805	27.324.720	72,67	5 Unit	3 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Laran tuka	5.000.000	3.000.000	2.940.000	60.000	98,00	1 Unit	1 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Laran tuka	5.000.000	3.000.000	2.350.000	650.000	78,33	3 Unit	3 Unit

Tabel teraebut menunjukkan bahwa pada tahun 2022 telah dialokasikan belanja sebesar Rp. 15.236.120.009 dan setelah mengalami perubahan menjadi Rp. 3.726.526.861,- yang digunakan untuk Program/Kegiatan rutin Dinas P2KBP3A, dengan realisasi sebesar Rp. 3.455.039.884 atau 93 %.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kinerja Perangkat Daerah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Flores Timur Tahun 2021. Penyusunan laporan ini merupakan langkah yang tepat dalam rangka memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas P2KBP3A tahun 2022 memiliki nilai strategis, karena selain memberikan gambaran mengenai capaian kinerja perangkat daerah untuk tahun 2022, serta capaian target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 ini, juga memberikan informasi realisasi keuangannya.

Berdasarkan gambaran tersebut maka dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur tahun 2022 sudah berkinerja dengan baik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target dari indikator kinerja sasaran strategis Dinas P2KBP3A tahun 2022 masih belum dapat dicapai secara keseluruhan sedangkan realisasi penyerapan anggaran sebesar 87,89%

4.2 Rekomendasi Tindak Lanjut

Berbagai permasalahan yang dihadapi dan dirumuskan pemecahannya belumlah akan memberikan arti yang optimal bila tidak disertai dengan komitmen tindak lanjut untuk melaksanakan perbaikan. Hal ini dianggap penting agar LAKIP benar-benar berfungsi sebagai instrument yang efektif bagi peningkatan kinerja Pemerintahan dan perbaikan layanan public.

Memperhatikan segala macam kekurangan, terutama terhadap beberapa indikator kinerja yang pencapaian kinerja masih rendah atau pun belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, maka langkah perbaikan di masa selanjutnya dipandang penting untuk dilakukan sebagai berikut:

1. Melaksanakan bimbingan/pelatihan secara berkala dan berkesinambungan bagi petugas lapangan khususnya pada pencatatan dan pelaporan.

2. Memperkuat kerjasama sama dengan lembaga – lembaga dalam penyelenggaraan program KB.
3. Mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat dan obat kontrasepsi dan untuk program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Perlunya penambahan tenaga lini lapangan.
5. Pembentukan forum data base terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Adanya kebijakan daerah yang menyangkut tentang perlindungan perempuan dan anak.
6. Mengaktifkan kembali sistem pelaporan SIMFONI (Pelatihan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak.
7. Membuat Grand Design Kependudukan

Akhirnya atas segala kelemahan dan kekurangan yang terjadi kami sadari semata- mata karena kelemahan ketidaksempurnaan kami sebagai manusia, namun demikian, segala kekurangan dan ketidaksempurnaan itu menjadi motivasi untuk melakukan langka- langkah perbaikan selanjutnya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 ini disampaikan sebagai salah satu ikhtiar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Larantuka, Januari 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten flores Timur,



SRI ARDI RAHAJU S.Sos, MAP

Pembina TK.I

NIP. 19691016 199903 2 007

**RENCANA KERJA TAHUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur
Tahun : 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-2023
Meningkatnya kualitas Pengendalian Penduduk dan Layanan Keluarga Berencana	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka TFR (%)	3,1
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (Point)	92,24
	Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Kasus)	20
	Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Kasus)	25

Larantuka, Januari 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Flores Timur,



SRI ARDI RAHAJU, S.Sos, MAP

PEMBINA TK.I

NIP. 19691016 199903 2 007

RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	ANGGARAN
			URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG G UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
Terwujudnya Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas											
								DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			13.311.280.354
			x	xx	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			x	xx	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100%	3.613.386.505
									Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	75%	
									Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	50%	
									Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100%	

			x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	8 Dok	63.049.080
			x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	2 Dok	18.049.700
			x	xx	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dok)	2 Dok	14.999.600
			x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)	7 Laporan	14.999.820
			x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	14.999.960
			x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semeseteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	3 Lap	2.449.194.695
			x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	14 Bulan	2.382.444.995

			x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	1 Dok	47.400.000
			x	xx	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Lap	19.349.700
			x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	1 Dok	14.314.700
			x	xx	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	14.314.700
			x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	1 Orang	14.264.760
			x	xx	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dok	14.264.760
			x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100%	231.960.930
			x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	2 Paket	1.973.660

			x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (paket)	3 Paket ATK	25.000.000
			x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Bahan Kebersihan Kantor)	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (Paket)	1 Paket	9.999.050
			x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BBM, Makan minum Rapat Internal)	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket BBM, 12 Paket Makan Minum	74.998.800
			x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (paket)	1 paket Jilid dan 1 Paket Penggandaan	29.999.760
			x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Makan Minum Tamu Rapat)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	12 Laporan	20.000.000
			x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	69.989.660
			x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	11 Unit	38.392.500
			x	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (unit)	3 Unit	38.392.500
			x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	90	688.689.800
			x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12 Laporan	1.499.800

			x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(laporan)	12 Laporan	35.990.000
			x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12 Laporan 93 Tenaga	651.200.000
			x	xx	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	90	113.520.040
			x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (servis,pajak,perpanjang STNK dan suku cadang)	Jumlah Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	Pajak kendaraan roda dua 32 unit,Pembayaran Pajak 4 unit roda 4, 1 unit kapal motor laut,servis, Suku cadang	70.600.000
			x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi (unit)	1 Unit Gedung dan 1 unit Balai Penyuluh	34.920.040
			x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (unit)	5 unit Laptop, 4 unit Printer	5.000.000

			x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (unit)	2 Unit	3.000.000
	meningkatkan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan			2 08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			193.451.755
	Indeks Pembangunan Gender			2 08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan yang berpartisipasi disektor publik(%)	46,00%	54.998.850
				2 08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan dan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG (perangkat daerah)	5 Perangkat Daerah	24.999.220
				2 08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kab/Kota (perangkat daerah)	5 Perangkat Daerah	24.999.220

			2	08	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Sosial dan Ekonomi dan Organisasi Masyarakat Kewenangan Kab/Kota (dokumen)	1 Dok	29.999.630
			2	08	02	2.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota (organisasi)	10 Organisasi	29.999.630
		Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terselesaikan (%)	0,001%	24.999.975
			2	08	02	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota (lembaga)	26 Orang	24.999.975
			2	08	02	2.03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	26 Orang	24.999.975
			2	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peringkat Pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berhasil dicapai	Tingkat Pratama	53.546.715

				2	08	04	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Penguatan (Lembaga)	4 Lembaga	29.957.325	
				2	08	04	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan (Lembaga)	4 Lembaga	29.957.325
				2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Data Gender dan Anak, untuk Dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan Anak Kabupaten/Kota (laporan)	1 Laporan	23.589.390
				2	08	04	2.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (layanan)	1 Layanan	23.589.390
				2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA DAN GENDER	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	34.999.675
				2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	34.999.675

			2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	34.999.675
		Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak (%)	0,02%	
									Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (%)	8 Desa	24.906.540
			2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota (orang)	35 Orang	24.906.540
			2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota (orang)	35 Orang	24.906.540
	Meningkatkan Pengendalian		2		14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			9.504.442.094
	Penduduk dan Keluarga Berencana	Menurunkan Angka Kelahiran Total (TFR)	2		14	02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah dokumen Pengendalian Penduduk (Dokumen)	7 Dok	388.599.600
			2		14	02	2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan pengolahan data kependudukan	6 Dok	388.599.600

			2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (dokumen)	1 Dok	24.999.840
			2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	3 Laporan	100.759.760
			2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	185.400.000
			2	14	02	2.02	13	Pengelolaan dan Pelaporan Data pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayan KB	12 Laporan	77.440.000
			2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	53,63%	
									Cakupan Akseptor Baru (%)	62%	7.217.842.494
			2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, In formasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dok	1.593.368.000
			2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	1 Dok	201.000.000

			2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruangan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruangan	3 Laporan	150.000.000
			2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	4 Laporan	243.200.000
			2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	914.938.000
			2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	84.230.000
			2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		790.000.000

			2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	15 Organisasi	290.000.000
			2	14	03	2.03	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	500 Orang	500.000.000
			2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	Jumlah Jenis Alat Kontrasepsi yang didistribusikan dan Sarana Penunjang Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota		3.568.875.894
			2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (laporan)	6 Laporan	36.300.000
			2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), (orang)	250 Orang	2.082.234.974
			2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (unit)	5 Unit	1.442.970.920
			2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	7.370.000

			2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	80%	1.265.598.600
			2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (organisasi)	6 Organisasi	29.293.600
			2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (dokumen)	35 Kampung KB	849.380.000
			2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang mengikuti Pelaksanaan KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	35 Kampung KB	386.925.000
			2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase remaja Perempuan Umur 15-19 tahun menjadi ibu atau sedang hamil anak pertama (%)	300 Keluarga	1.898.000.000
									Persentase Balita yang mengikuti KOPER PAUD (%)		

			2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Landia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		1.292.000.000
			2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	22 Unit	396.000.000
			2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		1.502.000.000

Jumlah Program : 9 dengan jumlah anggaran Rp. 13.311.280.354,-

Larantuka, Januari 2023

Kepala Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Kabupaten Flores Timur



Sri Ardi Rahayu, S.Sos.,MAP

NIP. 19691016 199903 2 007